

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian
Kinerja APBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10%	10,39%	103,90%	ST
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30%	95,65%	110%	ST
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi	Total Fertility Rate (TFR)	1,9–2 kelahiran	1,92 kelahiran	101,54%	ST
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70–76%	65%	89,04%	T

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	KATE-GORI
	Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	11,48%	9,27*%	110%	ST
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	ST
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	ST
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 2	Level 2	100%	ST
	Rata-rata				101,81%	Sangat Tinggi

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) IKU dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) IKU dengan kategori Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,81% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.3

**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian
Kinerja PAPBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92-2 Kelahiran	1,92 Kelahiran	102,04%	ST
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	9,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	100%	ST
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	5,1 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	110%	ST
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	100%	ST
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	100%	ST

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	KATE-GORI
		Mendapat Layanan Komprehensif				
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	66,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	115,26%	ST
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	30 Persentase (%)	72,73 Persentase (%)	110%	ST
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	30 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	110%	ST
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,17 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	110%	ST
6	Meningkatkan akses terhadap	Persentase Usia Kawin	9 Persentase	10.6 Persentase	82,22%	T

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
	layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	(%)	(%)		
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	100%	ST
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	110%	ST
Rata-Rata					104,13%	Sangat Tinggi

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, terdapat 11 (sebelas) IKU dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) IKU dengan kategori Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 104,13% dengan kategori Sangat Tinggi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat bidang-bidang dan upt sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pengukuran kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja APBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik periode Tahun 2025-2029 melalui 8 (delapan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PAPBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2021-2026

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender;
2. Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter;
3. Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian sasaran strategis tahun 2021-2026, realisasi 8 (delapan) indikator tersebut dapat dilihat pada table 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun
Sebelumnya untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KETERA-NGAN
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	4,21%	2,25%	6,74%	9,55%	10,39%	Meningkat
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi	10,42%	12,75%	19,64%	30,43%	95,65%	Meningkat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KETERA-NGAN
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	
		dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)						
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	2,03 (Th. 2020)	1,89 (Th. 2021)	1,89 Kelahiran (Th.2021)	1,94 Kelahiran (Th. 2023)	1,92 Kelahiran	Meningkat
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76,53 (Th. 2020)	78,42% (Th.2021)	78,42% (Th.2021)	67,78%	65%	Menurun
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	15,04 (Th. 2020)	13,65% (Th. 2021)	13,65% (Th. 2021)	9,27%	9,27% (Th. 2024)	Meningkat
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Meningkat

Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 2 (dua) indikator dengan realisasi yang tetap dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode renstra tahun 2021-2025. Penjelasan 8 (delapan) indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Indikator yang pertama yaitu Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan. Upaya membangun kemandirian desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional tentu

tidak dapat dipisah dari partisipasi masyarakat. Menurut UU Desa, forum dan ruang bagi partisipasi telah dibuka lebar dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan musyawarah desa. Melalui Musrenbangdes, perempuan dapat ikut serta mengajukan usulan pembangunan desa, dan menjadi masukan bagi unit pemerintah di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).

Merujuk pada penjelasan tersebut, diperoleh hasil perhitungan persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan tahun 2025 sebesar 10,39% yaitu sebanyak 37 desa dari 356 desa yang ada di kabupaten gresik telah mengakomodasi usulan perempuan, dengan target awal yaitu sebesar 10% desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada table 3.3 berikut.

Tabel 3.5

Jumlah Desa yang telah Mengakomodasi Usulan Perempuan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TAHUN 2025
1.	Dukun	26	0
2.	Balongpanggang	25	1
3.	Panceng	14	14
4.	Benjeng	23	0
5.	Duduksampeyan	23	0
6.	Wringinanom	16	1
7.	Ujungpangkah	13	0
8.	Kedamean	15	0
9.	Sidayu	21	12
10.	Manyar	23	3
11.	Cerme	25	2
12.	Bungah	22	2
13.	Menganti	22	0
14.	Kebomas	21	0
15.	Driyorejo	16	0
16.	Gresik	21	1
17.	Sangkapura	17	1
18.	Tambak	13	0
	Jumlah	356	37

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kecamatan yang sudah mengakomodasi usulan perempuan melalui musrenbang tahun

2025 yaitu Kecamatan Balongpanggang sebanyak 1 desa, Kecamatan Panceng sebanyak 14 desa, Kecamatan Wringinanom sebanyak 1 desa, Kecamatan Sidayu sebanyak 12 desa, Kecamatan Manyar sebanyak 3 desa, Kecamatan Cerme sebanyak 2 desa, Kecamatan Bungah sebanyak 2 desa, Kecamatan Gresik sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sangkapura sebanyak 1 desa.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG). Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 dari 46 OPD di Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada minimal 30% kegiatannya. Peningkatan yang signifikan ini didukung salah satunya oleh dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten gresik yang sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI.
3. Indikator yang ketiga yaitu Total Fertility Rate (TFR). Nilai Total Fertility Rate (TFR) adalah nilai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya yang digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator TFR Tahun 2025 yaitu

Aplikasi Siperindu. Nilai TFR tahun 2025 yaitu sebesar 1,92. Nilai TFR sebesar 1,92 kelahiran berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia suburnya.

4. Indikator yang keempat yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR). Nilai Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator CPR yaitu Aplikasi SIGA BKKBN. Nilai CPR tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 65% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan karena masih ada nilai yang dianut masyarakat yang menghambat kepesertaan KB. Berdasarkan target tahun 2025 sebesar 70-76% sehingga didapatkan nilai capaian Indikator CPR sebesar 89,04%. Meskipun nilai CPR mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun nilai capaian Indikator CPR tergolong dalam rentang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.
5. Indikator yang kelima yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Usia Kawin Pertama (UKP) yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan, sehingga nilai UKP dibawah 20 tahun semakin kecil maka semakin baik. Nilai UKP digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun 2024 dikarenakan perhitungan data UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat.

Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27%.

6. Indikator yang keenam yaitu Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Dari 100% target cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) tahun 2025, sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 316 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 295 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya prosesnya masih berlanjut di tahun 2026. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Secara rinci data kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif Tahun 2025 di Kabupaten Gresik

No	Bulan	Tahun 2025
1	Januari	15
2	Februari	30
3	Maret	9
4	April	24
5	Mei	14
6	Juni	38
7	Juli	33
8	Agustus	28
9	September	25
10	Oktober	42
11	Nopember	29
12	Desember	29
	Jumlah	316

7. Indikator yang ketujuh yaitu Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif. Hasil persentase kasus anak dalam situasi khusus yang mendapat layanan komprehensif ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026 dari target sebesar 100%. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Tabel 3.7

**Data Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani
Tahun 2025 Kabupaten Gresik**

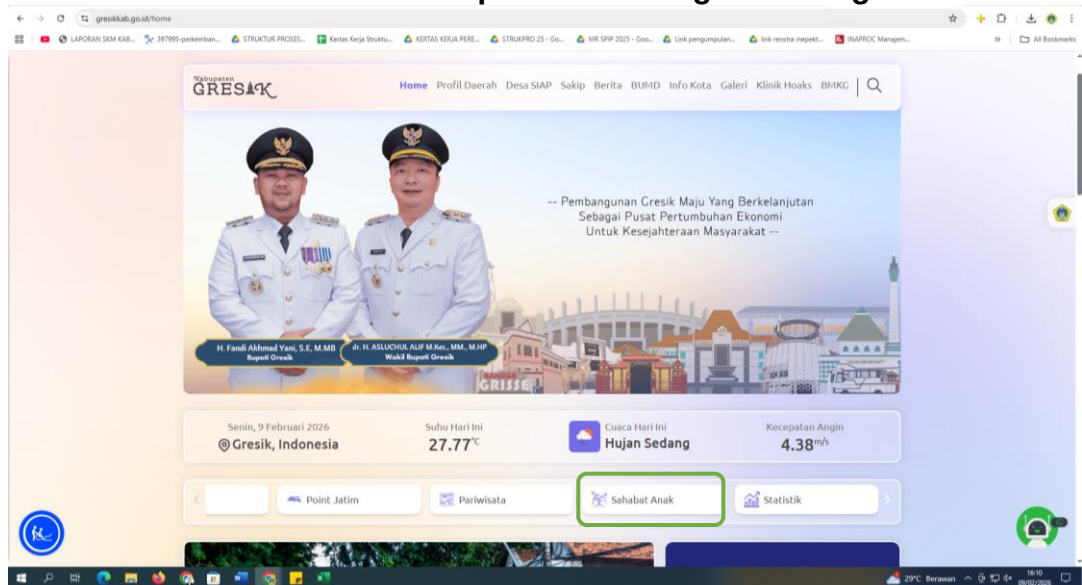
No	Bulan	Tahun 2025
1	Januari	27
2	Februari	40
3	Maret	18
4	April	15
5	Mei	10
6	Juni	36
7	Juli	26
8	Agustus	34
9	September	26
10	Oktober	36
11	Nopember	28
12	Desember	25
	Jumlah	321

8. Indikator yang kedelapan yaitu Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap

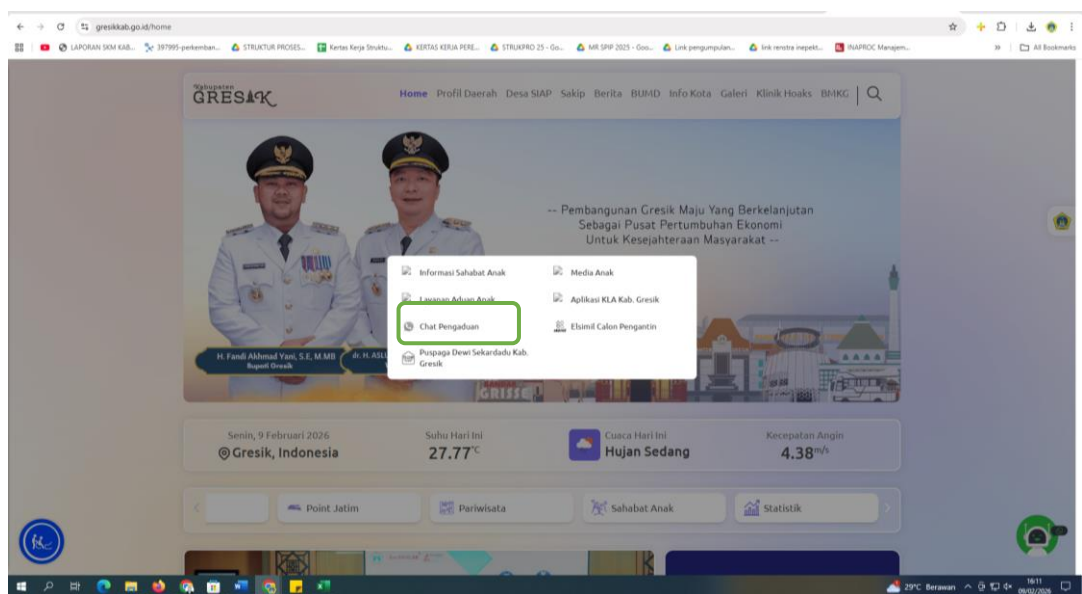
pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE pada tahun 2025 yaitu level 2 atau interaksi, yang berarti bahwa Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE. Penilaian level 2 didapatkan dari layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik yang telah terpublikasi dan terhubung pada website <https://www.gresikkab.go.id/>, sehingga masyarakat umum bisa mengakses layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik melalui website <https://www.gresikkab.go.id/> yang akan terhubung dengan akun whatsapp Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik.

Gambar 3.1
Menu Sahabat Anak pada Website gresikkab.go.id

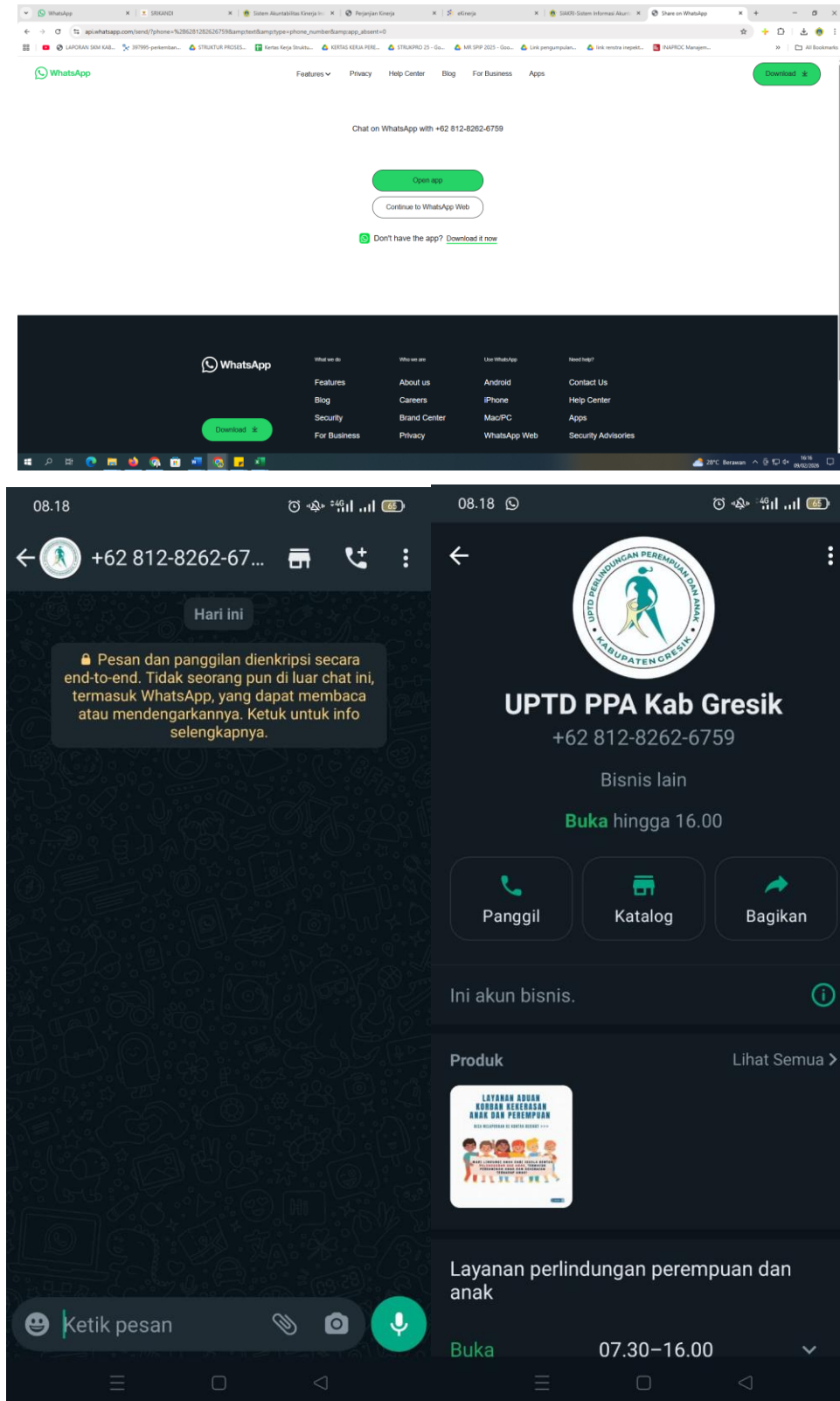


Gambar 3.2
Menu Chat Pengaduan



Gambar 3.3

Tampilan Chat Pengaduan UPTD PPA Kab. Gresik



Selanjutnya evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025-2029

1. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak;
3. Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan;
5. Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi;
6. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan;
7. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi;
8. Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan

Terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian sasaran strategis tahun 2025-2029, realisasi 12 (dua belas) indikator tersebut dapat dilihat pada table 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
untuk Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92 Kelahiran	1,92 Kelahiran	Nilai sama dengan tahun 2024
		Persentase Usia Kawin	9,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	Nilai 2025 sama dengan 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
		Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun			Nilai belum diumumkan
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	10 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	MENINGKAT
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	65,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	MENINGKAT
4	Meningkatkan	Rasio realisasi	40 Persentase	72,73 Persentase	MENINGKAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
	akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	(%)	(%)	
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	30,43 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	MENINGKAT
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,18 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	MENINGKAT
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	9 Persentase (%)	10.6 Persentase (%)	MENURUN
7	Meningkatkan akses, partisipasi,	Persentase kasus Kekerasan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
	kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif			
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	MENINGKAT

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 5 (lima) indikator dengan realisasi yang sama dengan tahun 2024, dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode renstra tahun 2025-2029. Penjelasan 12 (dua belas) indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Total Fertility Rate

Data Indikator Total Fertility Rate merupakan data yang diambil dari publikasi melalui aplikasi SIPERINDU Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), data yang dipublikasi merupakan realisasi data tahun 2025 dari hasil Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025, dimana data tersebut sama dengan data baseline tahun 2024 yaitu sebesar 1,92 kelahiran yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia subur.

2. Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun

Data Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun masih menggunakan realisasi data tahun 2024 dikarenakan data laporan usia nikah tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat. Realisasi indikator Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27% yang berarti bahwa terdapat 9,27% perempuan berusia dibawah sama dengan 20 tahun yang menikah dibandingkan dengan total semua perempuan yang menikah di tahun 2024.

3. Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator yang ketiga yaitu Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin, indikator ini merupakan indikator baru di renstra periode 2025-2029, Indikator ini mengukur tren atau tingkat pengajuan dispensasi kawin di pengadilan untuk calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator tersebut di tahun 2025 yaitu sebesar 11,92% dan meningkat ,92% dari baseline tahun 2024 yaitu 10%. Peningkatan tesebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kasus perkawinan usia anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

4. Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator ini menunjukkan seberapa besar cakupan layanan perlindungan yang diberikan kepada anak pekerja migran setelah mereka kembali ke daerah asal. Hingga akhir tahun 2025 belum ada anak pekerja migran yang dipulangkan, namun fasilitas pendampingan sudah tersedia pada UPT perlindungan perempuan dan anak (UPT-PPA). Sehingga realisasi indikator ini dianggap 100%.

5. Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif

Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan penanganan secara menyeluruh sesuai kebutuhan anak, dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.

Anak dalam situasi khusus mengacu pada anak yang menghadapi kondisi kerentanan atau ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraannya, antara lain meliputi:

- Anak korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual,
- Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
- Anak korban perdagangan orang,
- Anak korban bencana atau konflik,
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait.

Layanan komprehensif mencakup paling sedikit tiga dari lima kategori layanan utama, yaitu:

- Layanan medis/kesehatan,
- Layanan psikologis/psikososial,
- Pendampingan hukum dan bantuan hukum,
- Penyediaan shelter/rumah aman,
- Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026. Realisasi di tahun 2025 sebesar 100% sama dengan baseline tahun

2024 yang juga sebesar 100% yang berarti bahwa semua kasus anak korban kekerasan yang dilaporkan telah tertangani.

6. Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori: tangguh, berkembang, atau rentan. Pengukuran iBangga bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi keluarga, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keluarga.

Indikator ini diambil melalui Publikasi di aplikasi SIPERINDU Kemendukbangga, data yang digunakan merupakan data realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 76,9 skor indeks yang termasuk dalam kategori **iBangga** tinggi yang menunjukkan keluarga dalam kondisi tangguh, mampu memenuhi fungsi dan perannya secara optimal.

7. Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan

Rasio Realisasi Usulan Perempuan yang Diakomodasi dalam Perencanaan Pembangunan adalah persentase usulan kegiatan atau program yang disampaikan oleh perempuan melalui mekanisme partisipasi masyarakat (misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, forum konsultasi publik, atau kanal resmi pengusulan) yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan total usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode tertentu. Usulan perempuan yang dimaksud mencakup aspirasi, ide, atau kebutuhan yang diidentifikasi, dirumuskan, dan diajukan oleh perempuan secara individu atau kolektif, yang relevan dengan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan

infrastruktur di wilayahnya. Realisasi usulan perempuan tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang,
Musrenbangdes dan Forum OPD

No	Usulan	Sudah Diakomodasi	Belum Diakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan sosialisasi mengenai perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat	√	
2	Mendorong partisipasi politik pada perempuan di desa, khususnya perempuan akar rumput, antara lain dengan pendidikan politik bagi perempuan serta peningkatan softskill dan hard-skill yang dibutuhkan	√	
3	Mengembangkan Infrastruktur Ramah Disabilitas di seluruh kantor pemerintahan dan fasilitas umum, termasuk kantor pemerintahan dan fasilitas umum di desa, termasuk juga infrastruktur yang ramah Lansia		√
4	Meningkatkan perlindungan perempuan di tempat kerja, baik dalam perlindungan hukum maupun fasilitas keamanan dan infrastruktur yang responsif gender, termasuk penyediaan ruang laktasi dan tempat penitipan anak untuk bayi dan anak-anak	√	
5	Melanjutkan program/kegiatan Sekolah Perempuan di desa	√	
6	Kemitraan dengan organisasi masyarakat dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi penduduk sementara yang tidak memperoleh layanan berbasis status kependudukan		√
7	Menjadikan Desa Ramah Perempuan dan Anak di semua desa, mengembangkan Program JaketKu untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan layak bagi semua orang terutama bagi anak usia sekolah dan perempuan akar rumput		√
8	Ada pelatihan keterampilan untuk pelaku UMKM agar nantinya bisa membantu perempuan dalam perekonomian keluarga	√	
9	Diselenggarakan pasar kios di desa, agar para perempuan melalui umkm lokal dapat mandiri secara ekonomi	√	
10	Pelaksanaan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak di desa, seperti kelas ibu hamil	√	

No	Usulan	Sudah Diakomodasi	Belum Diakomodasi
11	Pelaksanaan pelatihan tentang Digital Marketing bagi perempuan di desa khususnya untuk perempuan pelaku UMKM	√	
Jumlah		8	3

Berdasarkan tabel tersebut rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 yaitu sebesar 72,73% meningkat dari baseline tahun 2024 sebesar 40%. Peningkatan ini menunjukkan tingginya tingkat akomodasi usulan perempuan dalam perencanaan, mengindikasikan perencanaan pembangunan yang responsif gender.

8. Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender.

Persentase Perangkat Daerah yang Minimal 30% Kegiatannya Dilengkapi Dokumen Analisis Responsif Gender adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang pada periode pengukuran memiliki sedikitnya 30% dari total kegiatannya dilengkapi dengan Dokumen Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), dengan jumlah seluruh perangkat daerah, dinyatakan dalam persen. Analisis Responsif Gender bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program/kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 OPD di Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada minimal 30% kegiatannya, realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 30,43%.

9. Unmet need ber-KB

Unmet Need adalah persentase perempuan kawin usia 15–49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi di suatu

wilayah. Nilai unmet need tahun 2025 sebesar 7,91%, nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 9,18%. Semakin rendah unmet need menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan kontrasepsi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

10. Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Usia Kawin Pertama $\leq$ 20 Tahun pada Keluarga Miskin adalah persentase calon pengantin (catin) dari keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dibandingkan dengan seluruh calon pengantin dari keluarga miskin pada periode tertentu. Keluarga miskin dalam indikator ini adalah keluarga yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, sedangkan data calon pengantin diambil dari aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) BKKBN. Nilai presentase usia kawin pertama dibawah sama dengan 20 tahun dari keluarga miskin tahun 2025 sebesar 10,6%. Nilai ini menurun dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingginya prevalensi perkawinan usia dini pada keluarga miskin, yang berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan sosial.

11. Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dengan pemberian layanan secara menyeluruh sesuai kebutuhan korban, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Layanan komprehensif dalam indikator ini mencakup, tapi tidak terbatas pada:

- Layanan medis/kesehatan,
- Layanan psikologis/psikososial,
- Pendampingan hukum dan bantuan hukum,
- Penyediaan shelter/rumah aman,

- Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi

Data persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 316 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 295 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya prosesnya masih berlanjut di tahun 2026. Realisasi data persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif tahun 2025 sama dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

12. Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Rasio Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan adalah persentase kepala rumah tangga perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan menerima minimal satu bentuk intervensi atau fasilitas dari program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau keterampilan pada periode tertentu dibandingkan dengan total kepala rumah tangga perempuan miskin. Kepala rumah tangga perempuan miskin dalam indikator ini merujuk pada perempuan yang berperan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga dan terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Program pemberdayaan meliputi, namun tidak terbatas pada bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pemasaran, fasilitasi usaha, pendidikan literasi keuangan, atau program peningkatan kapasitas lainnya yang bertujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Rasio Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan tahun 2025 sebanyak 8,64% dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan baseline tahun 2024 sebesar 6,86%. Nilai yang tinggi menunjukkan semakin banyak kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapat akses program pemberdayaan, mengindikasikan jangkauan program yang baik.

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gresik tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026 Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir
Rencana Strategis untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10%	10,39%	+
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30%	95,65%	+
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	1,9-2%	1,92 kelahiran	=
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76%	65%	-
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	12,15%	9,27*%	+
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat	100%	100%	=

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
	untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Layanan Komprehensif			
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	=
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 3	Level 2	-

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator dengan kategori meningkat yaitu indikator Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan, Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG), dan Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Terdapat 3 indikator dengan kategori tetap yaitu Total Fertility Rate (TFR), Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif, sedangkan indikator dengan kategori menurun ada 3 yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR) dan Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE.

Selanjutnya merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gresik tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2029 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir
Rencana Strategis untuk Periode Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92-2 Kelahiran	1,92 Kelahiran	+
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	8,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	-
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	5,6 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	+
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	=
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	=

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	71,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	+
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	40 Persentase (%)	72,73 Persentase (%)	+
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	100 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	-
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,12 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	+
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20	8 Persentase (%)	10.6 Persentase (%)	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
	bagi kelompok rentan	Tahun dari keluarga miskin			
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	=
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	+

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa terdapat 6 indikator dengan kategori meningkat yaitu Total Fertility Rate, Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin, Indeks Pembangunan Keluarga, Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, Unmet need ber-KB dan Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan. Terdapat 3 indikator dengan kategori tetap yaitu Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan, Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif, Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan

yang mendapat layanan komprehensif, sedangkan indikator dengan kategori menurun ada 3 yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun, Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender, Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Provinsi Jawa Timur / Kab. Kota Lain untuk periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	Tidak menggunakan indikator yang sama	10,39%	Nihil
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Tidak menggunakan indikator yang sama	95,65%	Nihil
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Nasional : 2,12 Prov. Jawa Timur : 1,96 Kota Surabaya : 1,65 Kota Mojokerto : 1,84 Kab. Lamongan : 1,82 Kab. Sidoarjo : 1,81	1,92 kelahiran	Lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi jawa timur, namun lebih rendah dibandingkan capaian kab/kota terdekat
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Tidak menggunakan indikator yang sama	65%	Nihil
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Tidak menggunakan indikator yang sama	9,27*%	Nihil
3.	Mewujudkan	Persentase Kasus	Tidak menggunakan indikator yang sama	100%	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif			
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Tidak menggunakan indikator yang sama	100%	Nihil
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Tidak menggunakan indikator yang sama	Level 2	Nihil

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Provinsi Jawa Timur / Kab. Kota Lain untuk periode Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	Nasional : 2,12 Prov. Jawa Timur : 1,96 Kota Surabaya : 1,65 Kota Mojokerto : 1,84 Kab. Lamongan : 1,82 Kab. Sidoarjo : 1,81	1,92 Kelahiran	Lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi jawa timur, namun lebih rendah dibandingkan capaian kab/ kota terdekat
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	Tidak menggunakan indikator yang sama	9,27* Persentase (%)	Nihil
2	Meningkatkan akses	Penurunan Kasus	Tidak menggunakan indikator yang sama	11,92 Persentase (%)	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	terhadap layanan perlindungan khusus anak	Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin			
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	Tidak menggunakan indikator yang sama	100 Persentase (%)	Nihil
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Tidak menggunakan indikator yang sama	100 Persentase (%)	Nihil
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	Nasional : 67,3 Prov. Jawa Timur : 67,3 Kota Surabaya : 71,6 Kota Mojokerto : 83,2 Kab. Lamongan: 70 Kab. Sidoarjo : 76,3	76,9 Skor Indeks (0-100)	Lebih tinggi dibandingkan capaian nasional,prov . Jawa timur, kota Surabaya, kab. Lamongan, kab. sidoarjo tapi lebih rendah dari capaian kota Mojokerto
4	Meningkatkan	Rasio	Tidak menggunakan indikator yang sama	72,73 Persentase	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan		(%)	
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	Tidak menggunakan indikator yang sama	95.65 Persentase (%)	Nihil
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	Nasional : 13,4% Prov. Jawa Timur : 8,8% Kota Surabaya : 13,2% Kota Mojokerto : 6,5% Kab. Lamongan : 12,1% Kab. Sidoarjo : 9,9%	7,91 Persentase (%)	Lebih tinggi dari capaian nasional, prov. Jawa timur, kota Surabaya, kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo, tapi lebih rendah dari capaian Kota Mojokerto
6	Meningkatkan akses terhadap	Persentase Usia Kawin Pertama	Tidak menggunakan indikator yang sama	10.6 Persentase (%)	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin			
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Tidak menggunakan indikator yang sama	100 Persentase (%)	Nihil
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Tidak menggunakan indikator yang sama	8.64 Persentase (%)	Nihil

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Tabel 3.14

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk periode Renstra

Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	Faktor penunjang : Dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten gresik sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI	Nihil
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Faktor penunjang : Ada upaya afirmatif untuk pendampingan yang aktif dari tim pokja PUG dan PPRG untuk mendampingi penyusunan dokumen di semua OPD	Nihil
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Faktor penunjang : ada anggaran DAK yang membiayai seluruh kegiatan KB	Nihil
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Faktor penghambat : masih ada nilai yang dianut masyarakat yang menghambat kepesertaan KB	Akan ditingkatkan edukasi dan promosi penggunaan alat kontrasepsi dalam perencanaan keluarga pada pasangan usia subur
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Faktor penunjang : ada kegiatan pendampingan keluarga dan aplikasi elsimil	Nihil
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta diperlengkapi	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
	Perlindungan Khusus		dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	Nihil
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Faktor penunjang : Ada fasilitasi dan dukungan dari Diskominfo	Nihil

Tabel 3.15

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk periode Renstra
Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	Faktor penunjang : ada anggaran DAK yang membiayai seluruh kegiatan KB	Nihil
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	Faktor penunjang : ada kegiatan pendampingan keluarga dan aplikasi elsimil	Nihil
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	Faktor penunjang : ada kegiatan pendampingan keluarga dan aplikasi elsimil	Nihil
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	Faktor penunjang : Ada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang berjalan dengan baik	Nihil
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
		Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	Faktor penunjang : Adanya penyelenggaraan program tribina dan kampung KB di setiap desa	Nihil
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	Faktor penunjang : Dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten Gresik sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI	Nihil
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	Faktor penunjang : Ada upaya afirmatif untuk pendampingan yang aktif dari tim pokja pug dan pprg untuk mendampingi penyusunan dokumen di semua OPD	Nihil
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	Faktor penunjang : ada anggaran DAK yang membiayai seluruh kegiatan KB	Nihil
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	Faktor penghambat: belum ada kegiatan yang secara khusus menyasar pada keluarga berpenghasilan rendah yang lebih rentan untuk melakukan perkawinan dibawah usia ideal atau bahkan usia anak	akan diadakan kegiatan yang terpadu dan komprehensif serta bersasaran
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
	multidimensi			
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Faktor penunjang : Ada evaluasi dan pendampingan keberlanjutan program	Nihil

C. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2025, anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebesar Rp. 22.453.100.650,75,- yang direalisasikan sebesar Rp. 20.317.055.975,70,- atau 90,49%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan untuk periode

Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomoda-si usulan perempuan	0,84%	Rp. 189.450.499	Rp. 166.315.500	87,79%
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	0,80%	Rp. 179.994.420	Rp. 158.751.945	88,20%
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangu-nan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	2,53%	Rp. 567.600.000	Rp. 514.638.052	90,67%
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	18,12%	Rp. 4.067.581.000	Rp. 3.135.440.824	77,08%
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	41,95%	Rp. 9.418.339.000	Rp. 9.255.758.538	98,27%
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	1,88%	Rp. 421.368.252	Rp. 395.640.524	93,89%
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	2,81%	Rp. 631.749.210	Rp. 512.215.429	81,08%
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	31,07%	Rp. 6.977.018.270	Rp. 6.178.295.164	88,55%
				Rp. 22.453.100.650,75	Rp. 20.317.055.975,70	90,49%

Dari 8 (delapan) indikator Kinerja Utama, terdapat 3 (tiga) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi dan 5 (lima) IKU dengan realisasi anggaran kategori Tinggi.

Tabel 3.17

**Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan untuk periode Renstra
Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	40,13%	Rp. 9.010.808.770,48	Rp. 7.746.015.575,70	85,96%
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	11,39%	Rp. 2.556.510.950,00	Rp. 2.420.119.024,50	94,66%
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	11,12%	Rp. 2.497.859.086,67	Rp. 2.449.284.980,83	98,06%
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	0,64%	Rp. 143.274.336,67	Rp. 135.345.346,33	94,47%
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	0,64%	Rp. 143.274.336,67	Rp. 135.345.346,33	94,47%
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	11,29%	Rp. 2.534.579.169,68	Rp. 2.472.691.579,50	97,56%
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	0,28%	Rp. 63.150.166,17	Rp. 55.438.500,00	87,79%
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	0,28%	Rp. 63.150.166,17	Rp. 55.438.500,00	87,79%
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	11,59%	Rp. 2.601.390.500,00	Rp. 2.082.358.464,00	80,05%
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	10,49%	Rp. 2.354.584.750,00	Rp. 2.313.939.634,50	98,27%
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	1,88%	Rp. 421.368.252,09	Rp. 395.640.524,00	93,89%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
	perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	komprehensif				
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	0,28%	Rp. 63.150.166,17	Rp. 55.438.500,00	87,79%
				Rp22.453.100.650,75	Rp. 20.317.055.975,70	90,49%

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Tinggi.

Pada tahun 2025 capaian kinerja terhadap Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 90,49% yang termasuk dalam kategori Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dengan Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20% menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Berikut merupakan tabel efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2021-2026.

Tabel 3.18
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya untuk periode Renstra
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN PAPBD	EFISIENSI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodo-dasi usulan perempuan	103,90%	87,79%	15,51
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	110,00%	88,20%	19,82
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	101,54%	90,67%	10,71
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	89,04%	77,08%	13,43
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	110,00%	98,27%	10,66
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	93,89%	6,11
	Berbasis Gender dan Anak Yang	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	81,08%	18,92
	Memerlukan Perlindungan Khusus	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	100%	88,55%	11,45
			101,81%	90,49%	11,60

Berdasarkan rumus efisiensi didapatkan nilai efisiensi sebesar 11,60% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien dalam penggunaan sumber daya pada periode renstra tahun 2021-2026.

Selanjutnya yaitu tabel efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2025-2029.

Tabel 3.19
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya untuk periode
Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN PAPBD	EFISIENSI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	102,04%	85,96%	15,75
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	100%	94,66%	5,34
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	110%	98,06%	10,86
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100%	94,47%	5,53
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	94,47%	5,53
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	115,26%	97,56%	15,36
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	110%	87,79%	20,19
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	110%	87,79%	20,19
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	110%	80,05%	27,23
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	82,22%	98,27%	-19,53
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	93,89%	6,11
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	110%	87,79%	20,19
			102,73%	90,49%	12,18

Berdasarkan rumus efisiensi didapatkan nilai efisiensi sebesar 12,18% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien dalam penggunaan sumber daya pada periode renstra tahun 2025-2029.

Program/Kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.20

**Analisis Program/Kegiatan Penunjang pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah Periode Renstra 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Program : Program Pengendalian Penduduk Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
			Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Program : Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	Program : Program Perlindungan Perempuan Kegiatan : 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Program 1: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Program 2: Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.21

Analisis Program/Kegiatan Penunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	Program 1: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Program 2: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program 2: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan akses terhadap layanan	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
	perlindungan khusus anak	pengajuan dispensasi kawin	Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program 2: Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	Program : Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Program : Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	Indeks Pembangunan Keluarga	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
	Alternatif		1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program 2 : Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan : 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Program : Program Pengendalian Penduduk Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
			Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Program : Program Perlindungan Perempuan Kegiatan : 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota